

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Noor Muhammad, *Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Rechts Vinding, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Akhmad Wiyagus, Analisis Dan Pengelolaan Barang Bukti (Dalam Kajian Teoritis Dan Kerangka Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Bukti). Jurnal, Hlm. 4.
- Barda Nawawie Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2013, hlm. 67
- Angkasa angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda, Efektifitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi : Jurnal USM Law Review Vol 4 No. 1, 2021.
- Dadang kahmad. 2012. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 102.
- Febrianty, “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320.
- Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, “Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang (2013): 110.
- I Putu Krisna Ilham Wiantama, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati. (2021). Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung). Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2),
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana ”(penyelidikan dan penyidikan”* (bagian pertama, edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm. 1.
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The. Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24.
- Marwan Effendy. (2005). *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama: hlm. 56
- Ratna Nurul Alfiah. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hlm.15
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Jakarta: Universitas Indonesia, 1976 , hlm 45
- Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 51

Sudarto. 2012, *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.71.

Peraturan- Peraturan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 tahun 2024 tentang Kemeterian Hukum
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per- 006/A/JA/3/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia
10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Atau Benda Sita Eksekusi
11. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
13. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
14. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
16. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepala Kepolisian Negara Republik
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi